

Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru.....

Dari Halaman 1

komando TNI lainnya yang juga dikukuhkan hari ini.

Dalam pelantikan dan penguahan itu, Prabowo memang tidak cuma meresmikan enam kodam baru. Dia juga mengukuhkan dan meresmikan sejumlah kejtuan baru TNI.

Mulai dari 14 komando daerah AL, tiga komando daerah AU, satu komando operasi udara, enam grup komando pasukan khusus, dan 20 brigade teritorial pembangunan.

Selanjutnya, satu brigade infanteri marinir, satu regiment korps pasukan gerak cepat, 100 batalyon teritorial pembangunan, lima batalyon infanteri marinir, dan lima batalyon komando korps pasukan gerak cepat.

Usai menyampaikan peresmian, Prabowo langsung menyalakan sirine sebagai tanda dimulainya operasional satuan-satuan baru tersebut.

Berikut daftar enam Kodam baru yang diresmikan Prabowo:

1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai - meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol - meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi

Jalan Berlubang yang Kadang Berdebu, Kadang Berkuah

Dari Halaman 1

capkan. Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, bahkan sempat meninjau langsung ke Jalan Pendidikan I di Desa Sei Rotan beberapa waktu lalu. Katanya, perbaikan akan dimulai Juni 2025. Tapi Juli sudah habis, dan tak ada satu alat berat pun yang terlihat. Warga mulai menyebutnya "janji manis yang basi." Mereka tak lagi menghitung waktu dengan kalender, tapi dengan jumlah lubang yang kian menganga di jalan.

Akses ke SMP Negeri 9 Percut Sei Tuan di Desa Amplas juga baru mulai disentuh, setelah keluhan warga memuncak. Dan itupun masih sekedar rencana, katanya akan diaspal sebelum akhir tahun. Semoga tak sekadar jadi daftar kegiatan musiman

Bupati Batu Bara Akan Dilapor ke APH

Dari Halaman 1

korupsi tersebut ke aparat penegak hukum lainnya.

Sebab, menurutnya, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 73.LHP/ XVIII.MDN/12/2024, menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan fisik pejabat pembuat komitmen (PPK), PPTK, pengawas, penyedia, Inspektorat dan hasil pengujian laboratorium bahan dan material mengalami kekurangan volume, bahkan mutu pekerjaan.

Seperti, pembangunan Indoor Volleyball, Rehab Tribun Penonton Utara Stadion Mini, Rehab Tribun Penonton Selatan Stadion Mini, Rehab Sirkuit Disporas, Pembuatan Sirkuit Motocross, Pemeliharaan Gedung Serba Guna (GSG) Pemprov.

Kemudian, Rehab Lintasan Sepatu Roda, Rehab GOR Veteran, Rehab GOR Futsal dan Pengecatan Pagar Sumut Sport Center. Akibat kekurangan volume dan mutu pekerjaan sehingga negara dirugikan sebesar Rp1,7 miliar lebih.

Anggota DPRD Prov Sumut periode 2014-2019 ini mengaku memiliki data lengkap dan cukup valid, bahkan dalam waktu dekat bakal melaporkan mantan Kadispora Sumut yang kini menjabat Bupati Kabupaten Batubara ke aparat penegak hukum, karena diduga paling bertanggungjawab terhadap kerugian negara.

"Meskipun sudah menjadi kepala daerah di Kabupaten Batubara harus bertanggungjawab secara admin-

Kangkangi SE Mendagri

Dari Halaman 1

"Golden Boys" Bobby Nasution, tanggal 26 Juni 2025 lalu, telah mengangkangi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permendagri.

"LIPPSU menduga kuat perubahan yang melibatkan konco konco Bobby mengangkangi Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025," kata Ari Sinik di Medan, Minggu (10/8).

Di SE itu disebutkan, Pemprovsum dalam hal ini Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat belum merealisasikan dan mengimplementasikan SE Mendagri, menyatakan sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dibutuhkan kebijakan menyeluruh.

Yakin, guna memastikan kesesuaian pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Adapun Dasar Hukum diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, yaitu :a. Pasal 264 ayat (5) dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; dan

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ketua PKK Sumut Kunjungi Dua Posyandu

Dari Halaman 1

menanyakan langsung bagaimana pelayanannya. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Harapannya, dukungan PKK ini bisa mendorong tercapainya target ZeroDose di Sumut," ujar Kahiyang Ayu.

Kahiyang mengatakan, ZeroDose merupakan program nasional yang menargetkan penurunan angka stunting melalui peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak, terutama balita yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali. TP PKK Sumut menunjukkan komitmennya melalui edukasi, pendampingan, serta monitoring langsung ke desa-desa.

Kahiyang juga mengajal semua pihak termasuk pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk turut serta menyukseskan program tersebut demi generasi Sumut yang lebih sehat dan berkualitas.

3. Kodam XXI/Radin Inten - meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu
4. Kodam XXII/Tambun Bungai - meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
5. Kodam XXIII/Palaka Wira - meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
6. Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.

Singgung Perang Dunia

Presiden RI Prabowo Subianto juga menyinggung konflik yang tengah berkecamuk di Eropa dan Timur Tengah. Ia menggambarkan perang besar yang terjadi di benua Eropa dan tragedi kemanusiaan di Timur Tengah bisa jadi peringatan bahwa bangsa yang lemah akan menjadi korban.

"Di Timur Tengah kita lihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu, anak kecil dibantai, dan tidak ada yang bisa hentikan itu," kata Prabowo saat menyampaikan amanat upacara.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan memihak blok manapun. Namun, sikap itu menuntut pertahanan yang kuat.

"Tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat," ucapnya.

Untuk itu, dia pun melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade, dan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan. Dia bahkan menekankan

menjelang tahun anggaran habis.

Tentu, kita bisa menyalahkan anggaran. Bisa pula menyudutkan birokrasi yang ruwet. Tapi, apa cukup hanya dengan menyalahkan? Sementara rakyat terus menambal jalan secara swadaya dengan pecahan batu pembongkaran bangunan dan doa. Harapan mereka sederhana, agar perjalanan mereka lancar dan aman serta minimalis kemacetan.

Ada satu kisah lama yang selalu membuat saya bergidik setiap kali menulis tentang pemimpin dan pelayanan. Umar bin Khattab, khalifah besar yang adil itu, pernah berkata dalam satu malam yang sunyi: "Seandainya seekor keleleai jatuh di jalanan Irak karena jalannya tak rata, aku takut Allah akan menanyai aku di Hari Kiamat: mengapa engkau tidak ratakan jalan itu, wahai Umar?"

tratif maupun hukum pidana jika temuan-temuan itu terindikasi tindak pidana korupsi. Yakinih saya akan melaporkan oknum mantan Kadispora itu ke aparat penegak hukum," ujar Muhri.

Sebelumnya, pekerjaan kekurangan volume dan mutu pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik PPK, PPTK Dispora Sumut, pengawas, penyedia dan Inspektorat sesuai uji laboratorium dan material, yakni :

1. Pembangunan Indoor Volleyball mengalami kekurangan volume dan mutu pekerjaan sebesar Rp 536.751.274,41.
2. Rehab Tribun Penonton Utara Stadion Mini terdapat kekurangan volume sebesar Rp 344.524.984,92.
3. Rehab Tribun Penonton Selatan Stadion Mini terdapat kekurangan volume sebesar Rp 138.788.262,58,
4. Rehab Sirkuit Disporas terdapat kekurangan volume sebesar Rp 113.969.623,64.
5. Pembuatan Sirkuit Motocross terdapat kekurangan volume sebesar Rp 107.622.495,49.
6. Pemeliharaan Gedung Serba Guna (GSG) Pemprovsum terdapat kekurangan volume dan mutu sebesar Rp 350.114.493,32.
7. Rehab Lintasan Sepatu Roda terdapat kekurangan volume sebesar Rp 24.029.079,84.
8. Rehab GOR Veteran terdapat kekurangan volume sebesar Rp 63.915.403,26.
9. Rehab GOR Futsal terdapat kekurangan volume sebesar Rp 63.915.403,26.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Lebih lanjut, Ari Sinik mengatakan, adapun Isi dari Surat Edaran SE Mendagri, juga menyatakan antara lain:

1. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
2. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. Pengendalian Inflasi di daerah;
 - e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. Dukungan swasembada pangan; dan
 - g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah, meliputi:
 - a. Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.
 - b. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih.
 - c. Gubernur terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri pada minggu pertama bulan Mei Tahun 2025 dan Bupati/Wali Kota terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten/

bahwa pemimpin militer harus memimpin dari garis depan.

Dalam pandangannya, seorang panglima atau komandan tidak bisa hanya mengatur dari belakang, melainkan berada di tengah pasukan dan hadir di titik paling berbahaya untuk memberi contoh anak buahnya.

"Pemimpin adalah prajurit yang paling baik, harus berada di garis depan" ujarnya.

Menurut Prabowo, TNI merupakan bagian dari pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Kehadiran para tokoh yang mengenalkan seragam TNI di acara itu disebutnya sebagai tanda bahwa mereka siap terlibat dan mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia hanya akan bertindak untuk membela diri, dengan mengungsi strategi pertahanan defensif.

Prabowo menolak anggapan bahwa perang defensif mustahil dimenangkan. Baginya, jika setiap jengkal tanah, dari kampung hingga provinsi dipertahankan oleh rakyat, Indonesia tidak akan bisa ditaklukkan.

"Banyak negara mungkin merasa lebih kuat dari kita, tapi semangat kita sudah terbukti. Kita adalah bangsa pejuang yang tidak pernah mengenal menyerah," tutur Prabowo.(cnni/js)

la tak sedang bersajak. Ia sedang bergumul dengan rasa tanggung jawab yang begitu dalam. Ia tahu, pemimpin tak hanya bertanggung jawab atas rapat dan pidato, tapi juga atas lubang-lubang kecil yang bisa saja merenggut nyawa makhluk-Nya.

Lalu, jika Umar bisa takut masuk neraka karena seekor hewan, bagaimana dengan pemimpin hari ini yang membiarkan ribuan rakyatnya melintas di jalan rusak setiap hari, menghirup debu, terjerebab dalam genangan, atau jatuh tergelincir?

Barangkali terlalu naif berharap ada Umar di masa kini. Tapi setidaknya, kita boleh berharap ada yang masih mau mendengar jeritan dari balik lubang di jalan itu.

Dan semoga, jalan-jalan yang rusak itu bukan cermin dari hati-hati yang ikut retak di gedung-gedung pemerintahan.(*)

10. Pengecatan Pagar Sumut Sport Center terdapat kekurangan volume sebesar Rp 39.229.762,40. Total kelebihan bayar akibat kekurangan volume penyedia jasa sebesar Rp1,7 miliar lebih.

Terpisah, dilansir dari orbitdigitaldailycom, Ahad (10/8), Inspektur Provinsi Sumatera Utara mengaku belum mengetahui adanya temuan kerugian keuangan negara atas pengadaan barang dan jasa di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2024.

Kepala Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap mengaku pihaknya masih melakukan upaya klarifikasi.

"Di cek dulu ya," kata pesan singkat Sulaiman Harahap menjawab konfirmasi temuan LHP BPK Sumut terkait kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,7 miliar di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara saat dipimpin Bahrudin Siagian.

"Berita temuan audit BPK ini sudah viral di mana-mana. Sangat aneh jika seorang Kepala Inspektur Pemprov Sumut tidak mengetahui. Padahal kehadirannya dari Pemko Medan untuk membantu Gubernur Bobby Nasution agar lebih profesional, berintegritas dan loyalitas. Bahkan patut dibanggakan," kata Muhri, seraya menyatakan dengan tegas: Inspektur memiliki tugas strategis melakukan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan kepatuhan pengadaan barang dan jasa, tahun anggaran 2024.(A-10)

Kota Tahun 2025 kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua bulan Mei Tahun 2025.

d. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu keempat bulan Mei Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.

e. Pembahasan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah bersama DPRD guna memperoleh kesepakatan bersama, dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni Tahun 2025 untuk provinsi dan minggu kedua bulan Juni Tahun 2025 untuk kabupaten/kota.

f. Penyampaian Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD, untuk dijadikan sebagai dasar perubahan APBD, dilaksanakan pada akhir bulan Juni Tahun 2025.

h. Dalam hal SiLPA TA 2024 (Audited) belum diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum pelaksanaan fasilitas Ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, maka Pemerintah Daerah dapat menggunakan data prognosis SiLPA TA 2024 pada rancangan akhir Perubahan RKPD Tahun 2025, dan memastikan penggunaan SiLPA TA 2024 (Audited) pada Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2025.

Membaca dari SE Mendagri Nomor 900.1.1/940/SJ, LIPPSU memperhatikan Point 3, berdasarkan sumber informasi dari Pemprovsum, Pemprovsum sampai Agustus belum menyelesaikan agenda dari ketentuan dan langkah langkah yang diamanahkan oleh SE Mendagri tersebut.

"Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya TAPD, dan sibuknya mengobok obok APBD 2025 yang dilakoni oleh Tim Asistensi yang ilegal, maka terabaikan amanah SE Mendagri Nomor 900.1.1/940/SJ," pungkas Ari Sinik.(A-10)

"Ada layanan untuk ibu hamil, Balita, Lansia, bahkan sudah terintegrasi dengan TK/PAUD. Ini merupakan praktik baik yang patut dijadikan role model bagi Posyandu lainnya di Sumut," jelas Faisal.

Ia menambahkan, bahwa kehadiran Ketua PKK Sumut dan tim, dapat mendorong percepatan cakupan imunisasi, terutama bagi anak-anak yang belum mendapat imunisasi dasar, sehingga target capaian ZeroDose di Sumut, bisa terwujud.

"Hari ini sekaligus kita kejar, Balita yang belum diimunisasi. Terus kita dorong semua orang tua untuk membawa anaknya ke Posyandu, agar memperoleh imunisasi lengkap. Karena imunisasi adalah hak anak, dan orang tua wajib memberikan perlindungan untuk kesehatan mereka," tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Kabupaten Langkat Endang Kurniasih Syah Afandin, jajaran pengurus TP PKK Provinsi dan Kabupaten.(A-05)

TNI di Garis Depan

diganggu. Nenek moyang kita, kakek kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang, jangan pernah lupa sejarahnya," kata Prabowo saat memberi sambutan di acara tersebut.

Prabowo mengatakan, generasi muda, khususnya prajurit TNI, tidak boleh melupakan sejarah kelam tersebut. Dia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pernah ratusan tahun dijajah dan kekayaannya dirampas.

Menurut Prabowo, tidak ada bangsa merdeka tanpa memiliki tentara yang kuat. Dia menilai Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun sejarah telah menunjukkan bahwa setiap upaya membangun kesejahteraan rakyat kerap mendapat gangguan dari luar.

"Kekayaan kita dirampok, kita diadu domba di antara kita," tegasnya.

Sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan komitmennya memperkuat pertahanan nasional. Dia menyebut situasi dunia saat ini penuh ketidakpastian, dan meskipun Indonesia tidak menginginkan perang, ancaman dapat datang kapan saja.

"Kita harus mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan kita," katanya.

Dalam amanatnya, Prabowo juga menekankan pentingnya kepemimpinan di lapangan. Dia meminta para panglima dan komandan pasukan untuk selalu memimpin dari depan, berada di tengah pasukan, dan siap menghadapi situasi paling berbahaya.(cnni/js)

MAKI Minta KPK

Dari Halaman 1

Karena kan uang tadi kan kemudian mengalir ke mana-mana, mengalir kepada siapa," kata Boyamin kepada wartawan, Minggu (10/8/2025).

Boyamin mengapresiasi KPK yang telah menaikkan pengusutan perkara kuota haji tersebut ke tahap penyidikan. Boyamin menyebut pihaknya akan terus mengawal kasus itu.

"Dan kami tetap mengawal itu, dan kalau lemot lagi tetap kami gugat praperadilan, dan kita pantau terus," ucapnya.

Boyamin juga berkalkulasi perkiraan kerugian negara di kasus ini dapat mencapai Rp 500-750 miliar. Hitungan itu didapat dari harga biaya haji khusus yang dikenakan 5 ribu dolar atau sekitar Rp 75 juta.

Pada perkara ini, kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah, dibagi dua untuk reguler dan khusus. Hal itu, kata Boyamin, jelas melanggar aturan.

"Yang 10.000 (kuota) kan dikasih kan khusus. Nah kalau itu kan dijual 5 ribu (dolar) semua, 5 ribu kali 10 ribu sudah berapa. Artinya 7,5 kali berapa, ya Rp 750 miliar," ucap dia.

"Mungkin bisa kurang tapi ya bisa jadi Rp 500 miliar paling tidak nah itu terus uang itu kemana saja, nah itu maka proses penyidikan ini adalah suatu yang sudah seharusnya," tambahnya.

Diketahui, KPK telah mengumumkan kasus ini berada di tahap penyidikan. KPK tengah membidik sosok pemberi perintah terkait kuota haji yang tidak sesuai aturan.

"Potential suspect-nya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, kemudian juga aliran dana," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (9/8).

Tak hanya itu, KPK juga akan menelusuri aliran dana terkait pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan. Kendati demikian, Asep belum membeberkan lebih lanjut terkait sosok pemberi perintah dan pihak yang menerima aliran dana itu.

"Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut," tuturnya.(det/js)



Rumit RaihGuru Besar

Dari Halaman 1

adalah kebijakan penilaian angka kredit yang "dinolkan" kembali saat pengajuan dari Lektor Kepala ke Guru Besar. Artinya, seluruh angka kredit sebelumnya dianggap tidak berlaku dan dosen harus memulai lagi dari nol dan harus engejar Angka Kredit 450, seakan seluruh capaian akademik sebelumnya tidak diakui. Ini jelas bukan hanya melemahkan semangat, tetapi juga merusak logika pengembangan karier akademik.

Persyaratan lain yang tak kalah rumitnya disebut sebut harus pernah menjadi panbita seminar internasional, padahal Presiden Prabowo sendiri seringkali mengungkapkan bahwa seminar selama ini tidak memberi efek. Hal lain tidak kalah penting harus pernah menjadi dosen tamu di luar negeri.

Praktik ini bukan hanya janggal secara administratif, tetapi juga kontraproduktif dalam mendorong peningkatan mutu dosen. Seorang dosen yang telah mengabdikan belasan bahkan puluhan tahun dan berhasil mencapai Lektor Kepala tentu sudah memiliki beban kerja tri dharma yang sangat signifikan. Namun, ketika akan mengajukan Guru Besar, justru dihentikan oleh "titik nol" yang menyakitkan. Hal ini menjadi ironi dalam sistem yang seharusnya menghargai proses dan kontinuitas kontribusi ilmiah.

Persoalan ini diperparah oleh prosedur birokratis yang rumit, mulai dari pengajuan dokumen, penilaian angka kredit oleh tim penilai, hingga validasi publikasi ilmiah yang sering kali bertele-tele. Bahkan satu artikel jurnal bisa ditolak hanya karena alasan administratif seperti kurangnya jumlah penulis atau tidak sesuai template. Belum lagi proses upload ke sistem aplikasi yang rentan error, tanpa ada pendampingan teknis yang memadai.

Sementara itu, dukungan kelembagaan terhadap pengembangan dosen di PTKIN masih minim. Tidak semua kampus memiliki pusat riset yang aktif, akses jurnal ilmiah internasional yang memadai, atau pelatihan intensif penulisan akademik. Dosen yang berada di daerah semakin tertekan karena harus bersaing dalam standar nasional, namun dengan sumber daya yang sangat terbatas.

Negara melalui Kementerian Agama dan Ditjen Pendidikan Islam perlu segera mengevaluasi kebijakan ini. Jika benar angka kredit dinolkan, maka perlu ada regulasi khusus yang menjelaskan secara adil dan akuntabel. Kebijakan tersebut tidak boleh mematahkan jenjang karier dosen, melainkan mendorongnya untuk berkembang secara berkelanjutan. PTKIN yang selama ini berperan penting dalam pengembangan pemikiran Islam di Indonesia, tidak boleh menjadi korban dari sistem manajemen SDM yang kaku dan tidak berpihak.

Perlu ada terobosan. Misalnya, sistem penilaian berbasis portofolio yang menilai perjalanan akademik secara holistik, bukan sekadar akumulasi angka. Pendekatan digitalisasi harus juga disertai pelatihan sistematis dan kemudahan akses, bukan malah menambah beban teknis dosen.

Dosen-dosen PTKIN tidak kekurangan semangat atau kompetensi. Mereka hanya membutuhkan ekosistem yang adil, transparan, dan memotivasi. Jika jalan menuju Guru Besar semakin sunyi dan berliku, bukan tidak mungkin kita akan kehilangan semangat intelektual dari mereka yang sejatinya siap memberi sumbangsih besar bagi keilmuan dan peradaban bangsa.